BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solihin Abdul Wahab adalah:

> "Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implemen"t*. Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berati *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu),

(Webster dalam Wahab, 2004:64).

Berdasarkan diatas maka implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktinya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga

membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

> "Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan"
> (Mazmanian dan Sebastiar).

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2.1.2Pengertian Kebijakan

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau suatu target, dibutuhkan adanya pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Parlata Westa, bahwa:"Aktifitas atau usaha – usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi semua unsur yang dibutuhkan".(Marsuki, 2002:19)

Berdasarkan pendapat di atas penyusun menyimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan sebuah rencana seharusnya dilakukan dalam bentuk perumusan terlebih dahulu lalu ditetapkan dan ini amat terasa didalam sebuah instansi pemerintah di Desa Cibening yang telah diteliti.

Konsep implementasi dalam penelitian ini juga didasari oleh apa yang dikemukakan George C.Edward, ia menguraikan pengertian implementasi

kebijakan sebagai :“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

(Agustino, 2008:149).

Melihat dari uraian diatas penyusun menyimpulkan bahwa konsep implementasi itu telah digunakan oleh intansi kelurahan cibening untuk memenuhi sinergitas yang sudah ditetapkan.Edward mengemukakan adanya 4 (empat) variabel baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu:

a. Komunikasi, persyaratan utama bagi komunikasi kebijakan yang efektif adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan.Komunikasi berpengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi kebijakan.Komunikasi yang baik akan melancarkan penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada saat kebijakan itu dibuat.
b. Disposisi, atau sikap adalah watak dan karakteristik yang dimilikii oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, sehingga sikap yang positif juga akan memberikan pengaruh positif terhadap implementasi kebijakan.
c. Sumber Daya,variabel ini merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Tanpa sumber daya, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
d. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan .salah satu dari aspek struktur dari setiap organisasi adalah adanya Standar Operasi Prosedur (SOP). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *Red-Tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

(Edward, 2001:28)

Melihat dari keempat variabel Edward, penyusun menyimpulkan bahwa: pertama,komunikasi itu sangat berpengaruh terhadap kelancaran penerapan suatu kebijakan dalam pembuatan sebuah kegiatan. Kedua, implementasi kebijakan berpengaruh positif ataupun negatif itu tergantung pada karakteristik implementor.Ketiga, ketidak adaanya sumber

daya.Sedangkan menurut Agustino, dalam bukunya,Dasar-Dasar Kebijakan Publik juga mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai :

> "Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu,pejabat-pejabat, ataupun kelompok-kelompok pemerintah atauswasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yangtelah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan"(Agustino,2008:32).

Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, dan Carl Friedrich. Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai:"kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan ".

Penyusun menyimpulkan bahwa ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah.kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek.Dari beberapa teori-teori tersebut di atas, selajutnya penyusun menyimpulkan implementasi kebijakan menyangkut dalam tiga hal pokok, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan
3. Adanya hasil kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha untuk mencapai tujuan, sehingga setiap kegiatan memiliki kejelasan dalam bergerak. Menurut Lowi dalam bukunya *American Bussines Public Polis* memberikan batasan tentang kebijakan yaitu sebagi berikut :

> "Kebijakan adalah pernyataan umum yang dibuat oleh otoritas pemerintahan dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku warga Negara dengan menggunakan sanksi-sanksi yang positif dan negatif ".Lowi (1980:6)

Selanjutnya menurut Lowi masihdalambukunya *Penelitian Kebijakan Penelitian Sosial* yang sama pula memberikan batasan tentang kebijakan, yaitu :

> "Kebijakan adalah sebagai suatu keputusan yang mencakup suatu tindakan yang akan datang atau diharapkan, sebagaimana berbeda dengan suatu keputusan mengenai suatu pelayanan kognitif atau evaluatif".Lewi (1980:2)

Melihat dari pendapat bauer di atas penyusun menyimpulkan bahwa kebijakan adalah yang diharapkan dapat memberikan suatu perbaikan dimasa yang akan datang dan dapat memeberikan suatu terobosan-terobosan terbaru

2.1.3 Pengertian Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah adalah pemilihan sebuah alternatife terbaik dari sekian banyak alternatife yang bersaing satu sama lain untuk mendominasi yang lainnya, kegiatan ini berlangsung terus menerus. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Masyarakat biasanya lebih menilai apa yang tidak dilaksanakan oleh ketimbang melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Dapat dibayangkan apabila pemerintah kita saat ini berdiam diri terhadap kondisi krisis multi dimensional yang sedang menimpa bangsa kita atau terhadap meningkatnya angka pengangguran, kriminalitas, penyakit, musibah bencana alam dan lain-lain.Bahkan pemerintah dapat menciptakan pengaturan politik untuk mencapai konsensus, sehingga pada gilirannya pemerintah dapat mengambil keuntungan dari peran pengendali, penengah dan pelindung atau protektor dari konflik tersebut. Sampai disini kita dapat mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dapat menciptakan situasi dan kondisi, dapat pula terjadi sebaliknya bahwa kebijakan pemerintah diciptakan oleh situasi dan kondisi, dapat pula terjadi sebaliknya bahwa kebijakan pemerintah diciptakan oleh

situasi dan kondisi.Faried Ali dalam Studi Tentang Kebijakan Pemerintah, menguraikan defenisi kebijakan secara rinci. Ia mengungkapkan bahwa

> “Kebijakan Sebagai studi diartikan sebagai pernyataan kehendak yang diikuti oleh unsur paksaan atau pengaturan, sehingga dalam pelaksanaanya akan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki.
> (Faried Ali, 2010:2)

Maka dalam kerangka tersebut Ia menekankan perlunya kekuasaan (*power*)dan wewenang (*autority*) dalam pelaksanaan kebijakan yang dapat dipakai untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach, yaitu:

> ”Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas.Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang”(Leo Agustino (2008:138).

Dari kutipan tersebut, penulis pahami bahwa memang cukuplah mudah membuat dan merumuskan suatu kebijakan, namun implementasi dan pelaksanaannya yang kemudian akan tidak sesuai dengan harapan dan yang dicita-citakan sebelumnya, terlebih jika berada diatas kepentingan orang banyak.Inu Kencana Syafie, dalam bukunya *Kamus Pemerintahan* menyampaikan kebijakan pemerintah sebagai berikut:

> “Dimana perhatian utama kepemimpinan pemerintah adalah *public policy* (kebijakan pemerintah), yaitu apapun juga yang dipilih pemerinah, apakah mengerjakan sesuatu itu, ataukah tidak mengerjakan sama sekali (mendiamkan) sesuatu itu“.
> (Inu Kencana Syafie,2001:147)

Penyusun dari paparan Inu Kencana Syafiie diatas, pada hakekatnya pemerintah telah menjadi lokomotif dalam kegiatan bernegara, apapun yang dipilih oleh pemerintah adalah kebijakannya dan selalu bernaung dibalik otoritasnya dan kewenangannya, karena sistem perumusan kebijakan disuatu negara terdapat beraneka ragam model, tergantung pada situasi dan kondisi serta sistem pemerintahan yang berlaku pada suatu negara. Dalam konteks negara demokrasi, mengingat pentingnya masalah pengambilan kebijakan maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melibatkan publik dalam mengambil sebuah kebijakan.Perlu kita ketahui bahwa kebijakan itu tidak dibuat lebih berupa sebuah akumulasi.

Didalam proses kegiatan politik dengan proses kegiatan administrasi yaitu proses menggerakkan, menghidupkan dan mengembangkan Negara dalam mengembangkan ciri-ciri bangsa dan Negara, maka kebijakan-kebijakan yang merupakan reaksi respon atau tanggapan-tanggapan keinginan rakyat, kemauan bangsa dan kehendak Negara itu diwujudkan dalam sikap-sikap, langkah-langkah, dan perbuatan-perbuatan yang diterapkan dan dilakukan oleh pemerintah.

Selain itu, banyak definisi lain yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan, Agustino dalam bukunya*Dasar-dasar Kebijakan Publik*menyebutkan kebijakan sebagai: “Pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*)“, (Agustino, 2008:42).

Penyusun menyimpulkan dari pendapat di atas yaitu mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara Lasswel dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai

tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (*a projected program of goals, values and practices*).Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*).

Selanjunya Thomas R. Dye lebih lanjut yang kiranya sesuai dengan jalan pikiran ini dalam bukunya *Understanding Public Policy* edisi V yang mengatakan "*Public Policy*adalah :"Keadaan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu". (Dye 1999:42)

Berangkat dari defenisi tersebut ditegaskan bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan itulah *Public Policy* atau kebijakan pemerintah. Untuk itu berdasarkan fenomena tarsebut penulis menggunakan kebijakan pemerintah untuk menerjemahkan *Public Policy.*berkenaan dengan aturan main yang terdapat dalam kehidupan bersama baik dalam hubungan antar warga masyarakat maupun hubungan antar masyarakat dengan pemerintah, "kerja" hubungan suatu pemilihan keputusan oleh pemerintah yang meliputi aktivitas perumusan, pelaksanaan dan penilaian kebijakan pemerintah, kemudian "pemerintah" menurut Riant adalah Negara.

Selanjutnya Thomas R. Dye, masih didalam bukunya berjudul "*Public Policy Making*" mengemukakan pula defenisi *Public Policy* dari Robert Eyestone sebagai berikut :"Kebijakan Pemerintah adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungan".(Soenarko, 2005:42), Ini merupakan defenisi yang sangat luas, yang tentu saja baru memberikan kejelasan yang masih samar-samar dan orang masih perlu banyak mencari-cari pengertiannya".Berdasarkan defenisi-defenisi diatas yang telah dikemukakan beberapa ahli tersebut, maka akan ditemukan konsep inti kebijakan pemerintah, yaitu:

a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan pemerintah adalah tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh badan pemerintah yang memiliki wewenang.

b. Sebuah reaksi kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijkan pemerintah berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang sedang berkembang di masyarakat.
c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijkan pemerintah biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategis yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan pemerintah pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial.
e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan pemerintah berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langka-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan.

2.1.4 Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

> "Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur danteknikyang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraihdampak atau tujuan yang diinginkan" (Lester dan Stewart dalam Winarno,2002:101-102).

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka Edward III mengemukakanbeberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. *Comunication* (Komunikasi)
2. *Resources* (Sumber Daya)
3. *Disposition* (Disposisi)
4. *Bureaucratic Structur* (Struktur Birokrasi)

(Edward 1980:147)

Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, *target group* dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterimadengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakanya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi

sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tanganinya. Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya menusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi parapelaku rendah bahkan akan terjadi *goal displacement* yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumber daya peralatan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward III yaitu :

> “Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanahdan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”. (Edward III, 1980:102)

Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitassulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercayaakan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibatdalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan.

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat tiga macam elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, antara lain:

> "Tiga elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, yaitu: pengetahuan(*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), intensitas terhadap kebijakan"(Van Meter dan Van Horn dalam Widodo,2007:105).

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, dimanapengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operatingprocedures* atau SOP).

SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi strukturbirokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.

2. Sumber-sumber kebijakan.
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik.

(Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:79)

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu:

Kesatu yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

Kedua, sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:142). Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.

Keempat, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa:

> “Koordinasi bukanlah sekedarmenyangkut persoalanmengkomunikasikan informasi-informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan

> menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan" (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004:77).

Berdasarkan teori diatas maka Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo, bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik(Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

Menurut Teori implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud (George Edward III 1980: 1).

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya

diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

2.1.5 Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. (M.Irfan Islamy 1997:102-106) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu:

a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
b. Bersifat non *self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.
(Islamy 1997: 102-106)

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Solichin Abdul Wahab (1991:36) dalam buku analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan negara mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

Tahap I Terdiri atas kegiatan-kegiatan:

a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
b. Menentukan standar pelaksanaan
c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakanstruktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan:

a. Menentukan jadwal
b. Melakukan pemantauan
c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab, yaitu mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang

senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada impelementasi kebijakan negara.

2.1.6 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Budi Winarno implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan:

> "Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan" (Winarno 2002:102).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.

Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukug implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setelah membaca dan mengutip beberapa definisi menurut para ahli diatas saya dapat mengerti dan menganalisi apa itu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan suatu keputusan atau program yang dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang ada.

Implementasi kebijakan dapat berhasil apabila empat faktor dapat terpenuhi dan berjalan, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi

Dengan komunikasi masyarakat atau pemerintah yang mengimplementasi mengetahui apa yang harus dilakukan, dapat terhubung dengan semua elemen yang ada.

Sumber daya juga merupakan hal yang penting dalam implementasi. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan juga sumber daya informasi.

Disposisi merupakan faktor selanjutnya agar suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik. Disposisi merupakan watak yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan itu sendiri.

Dan faktor terakhir yang mempengaruhi suksesnya implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan dan sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan.

2.1.7 Model Kebijakan Pemerintah

Membuat kebijakan pemerintah ini merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan, karena bukankah kebijakan pemerintah *(public policy)* itu merupakan pengambilan keputusan *(Decision Making)* dan pengambilan kebijkan *(Policy Making),* yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. menurut Harold Laswell dalam bukunya *The Dicision Proces* bahwa ada beberapa tugas intelektual dalam persoalan tesebut di atas, yaitu:“Penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan penelitian, penilaian penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan “.(Laswell 1986:54). Selain daripada itu, ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan *public policy*, yaitu sebagai berikut di bawah ini :

1. Model Elit

   Pembentukan *public police* hanya berada pada sebagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa. Walaupun pada kenyataannya mereka sebagai preferensi dari nilai-nilai elit tertentu tetapi mereka masih saja berdalih mereflesikan tuntutan-tuntutan rakyat banyak.Oleh karena itu mereka cenderung mengendalikan dengan kontinyu, dengan perubahan-perubahan hanya bersifat tambal sulam.Masyarakat banyak dibuat sedemikian rupa tetap miskin informasi.

2. Model Kelompok

   Berlainan dengan model elit yang dikuasai oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka pada model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan *(interest group)* yang saling berebutan mencari posisi dominan.Jadi dengan demikian model ini merupakan fakta sentral dari politik serta pembuatan *public police*.Antar kelompok mengikat diri secara formal atau informal dan menjadi penghubung pemerintah dengan individu.Antar kelompok berjuang mempengaruhi pembentukan *public police,* bias membentuk koalisi mayoritas, tetapi juga dapat menimbulkan *check and balance* dalam persaingan antar kelompok untuk menjaga keseimbangan.

3. Model Kelembagaan

   Yang dimaksud dengan kelembagaan disini adalah kelembagaan pemerintah.Yang masuk dalam lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif (presiden, menteri-menteri dan departmentnya), lembaga legislative (parlemen) lembaga yudikatif, pemerintah daerah dan lain-lain.Dalam model ini *public police* dikuasai oleh lembaga-lembaga tersebut, dan sudang barang tentu lembaga tersebut adalah satu-satunya yang dapat memaksa serta melibatkan semua pihak.Perubahan dalam kelembagaan pemerintah tidak berarti perubahan kebijakan.

4. Model Proses

   Model ini merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasinya.Model ini akan memperhatikan bermacam-macam jenis kegiatan pembuatan kebijakan pemerintah *(public polic).*

5. Model Rasialisme

   Model ini bermaksud untuk mencapai tujuan serta efisien, dengan demikian dalam model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, untuk meningkatkan hasil bersihnya. Seluruh nilai diketahui seperti kalkulasi semua pengorbanan politik dan ekonomi, serta menelusuri semua pilihannya dan apa saja konsekuensinya, perimbangan biaya dan keuntungan *(cost and benefit)*.

6. Model Inkrimentalisme

   Model ini berpatokan pada kegiatan masa lalu dengan sedikit perubahan.Dengan demikian hambatan seperti waktu, biaya dan tenaga untuk memilih alternative dapat dihilangkan.Dalam arti model ini tidak banyak bersusah payah, tidak banyak resiko, perubahan-perubahannya tidak radikal tidak ada konflik yang meninggi kestabilan terpelihara tetapi tidak berkembang (konsentratif) karena hanya menambah dan mengurangi yang sudah ada.

7. Model Sistem

   Model ini beranjak dari memperhatikan desakan-desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan, atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public police.*Dan setelah di proses akan mengeluarkan jawaban. Desakan lingkungan sebagaimana yang penulis sampaikan di atas, dianggap masukan *(input)* sedangkan jawabannya dianggap keluaran *(output)*, yang berisi keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, tidakan-tindakan, kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pemerintah.

2.2 Pengertian PNPM Mandiri Pedesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan pastisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan, dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan), meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatkan modal social masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

2.2.1 Latar Belakang PNPM

Program yang dinamakan PNPM Mandiri *(Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri),* merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan.

PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di kota Palu, Sulawesi Tengah. Program Pemberdayaan Masyarakat ini dapat dilakukan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air.Dalam pelaksanaannya program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di pedesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat / kelembagaan local seperti: pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 milliar per kecamatan, tergantung daripada jumlah penduduk tersebut.

Pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan berada di bawah naungan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri.Program ini didukung dengan pembiyaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih memfokuskan pada dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Pada permasalahan PNPM ini lebih menggunakan model kebijakan prosedural karena kebijakan prosuderal ini lebih menampilkan hubungan yang dinamis diantara variable-variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan dengan membuat sebuah prediksi-prediksi dan melahirkan beberapa solusi yang optimal. PNPM Mandiri Pedesaan juga memiliki beberapa prinsip lainnya, yakni:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia.
2. Setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya dan prinsip demokratis.
3. Setiap pengambilan keputusan pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

2.2.2Prinsip – prinsip pokok siKompak PNPM Mandiri Pedesaan

Pada pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan menekankan prinsip – prinsip pokok siKOMPAK, yang terdiri dari :

1. Transparansi dan Akuntabilasi. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelola kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
2. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
3. Keberpihakan pada orang/masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
4. Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
5. Partisipasi atau penglibatan masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.

6. Prioritas Usulan. Pemerintah dan Masyarakat harus memproirotaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengetasan kemiskinan, kegiatan mendesak bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
7. Kesetaraan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil dan bermanfaat.
8. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
9. Keberlanjutan.Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

2.2.3 Sosialisasi Dan Penyebaran Informasi PNPM

Sosialisasi dan penyebaran informasi dalam PNPM Mandiri pedesaan merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi mengenai program dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan kepada masyarakat.Upaya ini juga diharapkan menjadi media pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PNPM Mndiri Pedesaan kepada masyarakat luas.

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat penerima manfaat langsung kegiatan, yakni Rumah Tangga Miskin : para pelaku Program : instansi atau lembaga pendukung pelaksana PNPM Mndiri Pedesaan lainnya, baik dari kalangan pemerintah dan swasta : serta kelompok masyarakat umum lainnya.

Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi dan penyebaran informasi adalah dimengerti dan dipahaminya konsep, prinsip, prosedur, kebijakan dan tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan secara utuh, khususnya masyarakat di lokasi program sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima program, masyarakat umum, instansi atau lembaga lainnya.

Dengan demikian, upaya pelembagaan dan pengintegrasian prinsip serta prosedur program dalam masyarakat dan sistem pemerintahan regular, dapat berjalan optimal.

Guna mencapai pemahaman yang utuh tentang PNPM Mndiri Pedesaan di lokasi program, serta dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas terhadap keberadaan program, maka dalam pelaksanaannya, proses sosialisasi dan penyebaran informasi ini harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh berbagai pihak. Baik dalam berbagai kesempatan dan kegiatan yang khususnya dibuat oleh program maupun kesempatan dan kegiatan terhadap setiap lokasi program.

2.2.4 Jenis Dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan

Lingkup KegiatanPNPM Mandiri Pedesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin perdesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan, dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal social masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Pedesaan dapat diklarifikasikan atas 4 jenis kegiatan yang meliputi :(1) kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana dan sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, (2) peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keteranpilan masyarakat, (3) kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya local, (4) penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP).

Penentuan skala prioritas pendanaan kegiatan dilakukan masyarakat dalam musyawarah antar desa dengan menetapkan sejumlah kriteria yang meliputi aspek manfaatn, berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan, dapat dikerjakan masyarakat, didukung sumber daya yang ada dan upaya pelestarian kegiatan.

Prasaran dan sarana yang dipilih harus mendukung pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan dalam bidang kesehatan dan pendidikan.PNPM Mandiri Pedesaan tidak diperbolehkan untuk membiayai beberapa kegiatan sebagaimana dicantumkan dalam daftar larangan *(negative list).*Pelarangan ini didasarkan atas komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup, perlindungan hak anak, dan lebih memberikan perhatian kepada masyarakat umum terutama masyarakat miskin.